

LAPORAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGRA
BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH



TAHUN 2022

1. Forum Rapat Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2022

Bertempat di kantor Bappeda lantai 1, dihadiri Rapat Forum Perangkat Daerah yang dibuka oleh H. Hamly (Kepala Dinas Sosial).

Rapat Forum Perangkat Daerah ini dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait cakupan OPD Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Drs. H. Marsidik selaku nara sumber berharap melalui forum ini dapat memberikan masukan dan aspirasi baik dari masyarakat, dunia usaha serta instansi pemerintah serta pemangku kepentingan untuk penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2023.

Dr. H. Marsidik menyampaikan mengenai hal-hal mendasar dan pokok dalam perencanaan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara terutama kaitannya dengan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara serta arah kebijakan BPBD di Tahun 2023.

Kinerja Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah merupakan wujud komitmen BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara harus sejalan dan mengacu pada Visi Kabupaten Kutai Kartanegara , yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Hal ini menjadi gambaran dalam kegiatan penanggulangan bencana yang berarti “Menciptakan kabupaten yang aman dari bencana karena didukung oleh masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana serta didukung oleh Pemerintahan yang solid dalam memberikan kebijakan dan kewenangan dalam penanggulangan bencana”.

2. RAKOR KESIAPAN OPERASI KESELAMATAN MAHAKAM 2022

Tenggarong, Rapat Koordinasi Kesiapan Operasional Keselamatan Mahakam 2022, digelar di Ruang Data Satlantas Polres Kabupaten Kutai Kartanegara Awal Maret 2022

Dalam rangka pelaksanaan Operasi Keselamatan Mahakam 2022 *Tanpa Tindakan Tilang* yang akan dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 01 Maret s.d. 14 Maret 2022.

Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan personil serta Sarana dan Prasarana pendukungnya dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Mahakam 2022

Turut hadir dalam kegiatan rakor ini pihak terkait seperti: TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Jasa Raharja, dan BPBD yang diwakili oleh *Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Edy Haryadi, A.Pi.*

Kasatlantas Polres Kab. Kutai Kartanegara dalam pemaparannya, yang diwakilkan oleh *Tri* dari Polantas mengatakan pada pelaksanaan operasi keselamatan Mahakam tahun 2022 kali ini ada 7 pelanggaran prioritas yang menjadi sasaran operasi yakni;

masyarakat yang melanggar lalu lintas berpotensi menyebabkan terjadinya fatalitas kecelakaan lalu lintas antara lain :

(1) Menggunakan ponsel saat berkendara;

(2) Pengendara dibawah umur;

(3) Berboncengan lebih dari satu orang;

(4) Tidak menggunakan helm SNI;

(5) Mengemudi dalam pengaruh alkohol;

(6) Melawan arus lalu lintas dan;

(7) Tidak menggunakan safety belt dan mengemudi kendaraan secara ugal-ugalan

serta pelanggaran ODOL (*Over Dimensi Over Load*) bagi truk yang bermuatan melebihi kapasitas

“Operasi Mahakam ini digelar untuk mengedukasi masyarakat dalam tertib berlalu lintas serta mengutamakan keselamatan para pengguna jalan. Dalam hal ini pengendara sepeda motor maupun mobil, agar kita semua menjaga keselamatan dalam berkendara baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain agar kita menghimbau dan menginformasikan

kepada instansi masing-masing, keluarga, tetangga dan masyarakat serta untuk menekan angka kriminalitas dan angka kecelakaan berlalu lintas” pungkasnya.

3. RAYAKAN HUT KE 103, REDKAR MENJADI UNGGULAN

(1/3/2022), Assisten III Setkab. Kukar, Totok Heru Subroto beserta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara H. Marsidik dan jajaran dari bidang Pemadam Kebakaran mengikuti Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-103 tingkat Nasional secara virtual dari Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kutai Kartanegara

Upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA.

Dalam amanatnya, Safrizal ZA memberikan apresiasi kepada seluruh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam tugas dan tanggung jawab, khususnya berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19.

“Sebagai perangkat daerah yang mempunyai barisan terdepan, dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya api dan kondisi darurat, pemadam kebakaran dan penyelamatan telah menunjukkan prestasi yang luar biasa, penuh komitmen dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat,” ucapnya.

Safrizal ZA mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menggolongkan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai urusan wajib pelayanan dasar.

Bahkan secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa penyelenggaraan pemadam kebakaran adalah Dinas provinsi, Kabupaten/Kota yang menyelenggaraan Sub urusan kebakaran.

“Berdasarkan laporan penyelenggaraan urusan pemadam kebakaran pada tahun 2021, yang mandiri membentuk satuan Dinas sendiri baru 105 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi,” ujarnya.

Dari laporan nasional pemadam kebakaran dan penyelamatan tahun 2021, telah terjadi 17.768 kejadian kebakaran di seluruh Indonesia, penyebab kasus kebakaran paling banyak yaitu 5.274 yang diakibatkan oleh arus pendek aliran listrik.

Sedangkan, operasi penyelamatan sebanyak 79.559 kali, artinya kejadian penyelamatan non kebakaran lebih banyak dibandingkan dengan terjadinya kebakaran, ini menggambarkan bahwa pemadam kebakaran harus selalu memiliki kompetensi dan kemampuan.

“Melihat banyaknya kejadian tersebut, tentunya keterlibatan peran aktif masyarakat juga dibutuhkan, karena jika hanya mengandalkan petugas pemadam kebakaran saja tidak cukup untuk mengcover seluruh pelosok tanah air,” tambahnya.

Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 tahun 2020, tentang Pedoman Pembinaan Relawan Kebakaran, maka menurutnya seluruh Pemerintah Daerah segera membentuk dan membina relawan kebakaran (Redkar) yang disesuaikan kebutuhan untuk membantu pemadaman dan penyelamatan yang disesuaikan *fast response time* pungkasnya.